1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   Inflasi Kabupaten Lampung Utara pada Triwulan II Tahun 2026 relatif terkendali, dengan inflasi tahun kalender Januari–Juni sebesar 1,3163%. Harga sebagian besar kebutuhan pokok relatif stabil, meskipun terdapat fluktuasi pada komoditas cabai dan beberapa pangan strategis.

   Risiko ke depan terutama berasal dari fluktuasi pasokan dan produksi pangan, gangguan distribusi, peningkatan permintaan pada periode tertentu, serta perubahan harga yang diatur pemerintah. Untuk mengantisipasinya, TPID terus melakukan operasi pasar murah, penetrasi pasar, gerakan menanam, pemantauan harga, dan koordinasi lintas sektor.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

   Permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Lampung Utara meliputi:

   1. Fluktuasi harga dan ketersediaan bahan pangan pokok, terutama komoditas strategis.
   2. Kelancaran distribusi dan tata niaga yang masih perlu dioptimalkan untuk menjamin pasokan dan menjaga kestabilan harga.
   3. Keterbatasan informasi harga, stok, dan produksi yang cepat dan akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
   4. Peningkatan permintaan pada momen tertentu, seperti hari besar keagamaan dan tahun ajaran baru, yang berpotensi mendorong kenaikan harga.
   5. Dampak perubahan harga yang diatur pemerintah (administered prices), seperti BBM, LPG, listrik dan tarif angkutan.
   6. Koordinasi dan sinergi antar-OPD serta dengan daerah lain masih perlu terus diperkuat dalam mengantisipasi gejolak harga.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

   Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melaksanakan kebijakan pengendalian inflasi melalui pemantauan harga dan pasokan, Operasi Pasar Murah, Gerakan Serentak Penetrasi Pasar, serta koordinasi TPID lintas sektor. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok.

   Selain itu, dilakukan penguatan produksi pangan, informasi harga dan stok, serta sinergi antar-OPD dan dengan daerah lain guna mengantisipasi gejolak harga dan menjaga stabilitas inflasi.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

   Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Lampung Utara dinilai cukup efektif, ditunjukkan dengan kondisi inflasi yang relatif terkendali. Upaya melalui pemantauan harga, operasi pasar murah, penjagaan ketersediaan pasokan, dan koordinasi TPID telah membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

   Ke depan, kebijakan perlu terus diperkuat, terutama dalam menjaga pasokan dan distribusi

komoditas pangan strategis serta meningkatkan koordinasi antar-OPD agar gejolak harga dapat diantisipasi lebih cepat.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

    1. Meningkatkan ketersediaan dan produksi pangan, khususnya komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga.
    2. Memperkuat kelancaran distribusi dan tata niaga agar pasokan dan harga tetap stabil.
    3. Melanjutkan operasi pasar murah dan penetrasi pasar pada saat terjadi kenaikan harga atau menjelang hari besar keagamaan.
    4. Meningkatkan pemantauan harga dan stok secara berkala sebagai dasar pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat.
    5. Memperkuat koordinasi TPID dan kerja sama antar daerah dalam menjaga pasokan serta mengantisipasi gejolak harga.